

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH  
DAERAH (LPPD)  
DAN  
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG  
JAWABAN (LKPJ)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2020**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah Nya sehingga penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2019 Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat diselesaikan.

Penyusunan laporan ini merupakan kewajiban bagi Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah setelah tahun anggaran berakhir wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban kepada DPRD, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dalam penyusunan LPPD dan LKPJ ini tetap mengacu pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 yang merupakan suatu Dokumen Perencanaan Formal, sehingga semua komponen secara lengkap telah disajikan mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

LPPD dan LKPJ Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi, namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut. Semoga LPPD dan LKPJ Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Laut ini dapat memberikan peningkatan kinerja Aparatur khususnya pada tahun mendatang.

Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten tanah Laut mampu melaksanakan tugas pengabdian dan memberikan pelayanan kebencanaan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja.

Kepala Pelaksana BPBD  
Kabupaten Tanah Laut



**H. MUH/KUSRI, SP**

Nip. 19690315 199803 1 012



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Dasar Hukum.....	1
B. Gambaran Umum Daerah.....	1
C. Kondisi Geografis Daerah .....	2
<b>BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH .....</b>	<b>3</b>
A. Visi dan Misi .....	3
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah .....	3
C. Prioritas Daerah.....	4
<b>BAB III URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	
A. Urusan Konkuren .....	6
a. Ringkasan Urusan Wajib.....	6
1. Organisasi perangkat daerah .....	6
2. Program dan Kegiatan .....	7
3. Tingkat capaian urusan wajib .....	7
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat struktural dan fungsional .....	9
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran .....	9
6. Kesesuaian perencanaan pembangunan daerah .....	10
7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan .....	11
8. Permasalahan dan Solusi .....	13
<b>BAB IV REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019.....</b>	<b>15</b>
<b>BAB V TUGAS PEMBANTUAN.....</b>	<b>16</b>
<b>BAB VI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN .....</b>	<b>17</b>
A. Kerjasama Antar Daerah .....	17
B. Kerjasama dengan pihak ketiga .....	17
C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah .....	17
D. Pembinaan Batas wilayah .....	18
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.....	18



## **BAB VII PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL21**

A. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	21
B. Target dan Capaian SPM oleh BPBD .....	22
C. Realisasi .....	22
D. Alokasi Anggaran .....	22
E. Dukungan Personil .....	23
F. Permasalahan dan Solusi .....	23

## **BAB VIII AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH .....24**

A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja .....	24
B. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja..	25
C. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya .....	25
D. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah .....	26
E. Analisi Efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah di capai .....	26
F. Analisi Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja ..	26

## **BAB IX PENUTUP ..... 28**

### **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1.1</b> Kejadian Bencana di Kabupaten Tanah Laut .....	4
<b>Tabel 1.2</b> Jumlah Pegawai Pergolongan / Pendidikan Tahun 2019.....	4
<b>Tabel 1.3</b> Alokasi dan Realisasi Anggaran .....	5
<b>Tabel 1.4</b> Sarana dan Prasarana yang ada BPBD.....	6



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. DASAR HUKUM**

#### **Dasar Hukum Penyusunan LKPJ dan LPPD Kabupaten Tanah Laut.**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah;
4. Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Peraturan Presiden, Nomor 8 Tahun 2008, tentang Badan Nasional Penanggulangan bencana Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, tentang Penyelenggaraan Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, Tentang Peran serta Lembaga Internasional dan lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008, tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008, Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 Tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten tanah Laut.

### **B. GAMBARAN UMUM DAERAH**

Kabupaten Tanah Laut terletak pada posisi  $114^{\circ}30'20\text{ BT} - 115^{\circ}23'31\text{ BT}$  dan  $3^{\circ}30'33\text{ LS} - 4^{\circ}11'38\text{ LS}$  dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

Batas Wilayah

Utara Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru

Timur Kabupaten Tanah Bumbu dan Laut Jawa

Selatan Laut Jawa

Barat Laut Jawa

Luas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah  $3.631,35\text{ km}^2$  ( $363.135\text{ ha}$ ) atau sekitar  $9,71\%$  dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Jorong dengan luas  $628,00\text{ km}^2$ , kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas  $548,10$



km<sup>2</sup> dan Kecamatan Kintap dengan luas 537,00 km<sup>2</sup>, sedangkan kecamatan yang luas daerahnya paling kecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas hanya 127,00 km<sup>2</sup>. Berdasarkan tingkat kelandaianya wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 290.147 ha, wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar 43.060 ha, wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 26.833 ha dan wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar 12.890 Hektar.

### **C. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH**

Kondisi Geografis wilayah Kabupaten Tanah Laut, sebagian merupakan dataran rendah dan curah hujan yang tidak menentu, sehingga sistem pengaliran air yang terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta sistem saluran drainase tidak mampu menampung debit air kiriman dari sungai yang berhulu di Kabupaten Tetangga sehingga mengakibatkan banjir hampir secara rutin setiap tahunnya.

Kondisi sungai yang semakin hari / semakin lama semakin dangkal dan semakin menyempit serta berkurangnya daerah resapan air hal ini berkontribusi meningkatnya debit air. Jika terjadi curah hujan yang cukup tinggi akan mengalir kepermukiman maka ruas sungai alamiah kapasitasnya terlampaui dan mengakibatkan banjir.

Bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Tanah Laut adalah bencana banjir dan bencana kebakaran hutan dan lahan.



## BAB II

### RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

#### A. VISI DAN MISI

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang didalamnya mencerminkan apa yang ingin dicapai dan kemana suatu organisasi diarahkan. Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Visi merupakan arah langkah kedepan dengan penuh kepastian. Visi mampu merupakan gambaran konseptual tentang hari depan yang ingin diwujudkan dan mampu menyemangati.

Bertumpu pada konsep visi tersebut, Kabupaten Tanah Laut menetapkan visi ***Terwujudnya Tanah Laut Yang Berinteraksi, ”.***

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu memperjelas penggambaran visi yang ingin dicapai, dan membantu menguraikan upaya-upaya strategis yang harus dilakukan. Secara teknis, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi perumusan tujuan dan sasaran yang harus dicapai untuk mencapai mewujudkan visi daerah.

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan **“Tanah Laut yang BERINTERAKSI”**, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut:

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana, setidaknya diperlukan Strategi dan Arah Kebijakan BPBD Kab. Tanah Laut.

1. Strategi BPBD Kabupaten Tanah Laut :



- a. Peningkatan upaya penerapan inovasi dalam pelayanan kebencanaan melalui penggunaan peralatan yang telah terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan kebencanaan.
- b. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik untuk meningkatkan pelayanan Kebencanaan.
- c. Melindungi masyarakat terdampak bencana melalui mitigasi bencana, penguatan kelembagaan, penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Melalui penyelenggarakan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan berbagai pihak yang berkepentingan didalamnya diharapkan dapat memperbaiki, mengurangi kerusakan dan mengembalikan kondisi seperti semula sebelum terjadi bencana sehingga sasaran untuk meningkatkan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat terwujud.

## 2. Kebijakan BPBD Kabupaten Tanah Laut

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rumusan arah kebijakan :

1. Mewujudkan inovasi dan kreatifitas stockholder terkait, masyarakat dan dunia usaha untuk bersama sama dalam menanggulangi bencana.
2. Mewujudkan kesiapsiagaan petugas TRC, Pusdalops PB dan Peralatan BPBD dan merespon Penanggulangan bencana.
3. Mewujudkan kesiapsiagaan seluruh stackholder terkait, masyarakat dan dunia usaha secara terencana dan terpadu.
4. Mewujudkan ketangguhan dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.
5. Melaksanakan pemulihan bencana melalui rehabilitasi dan rekontruksi yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha bersama-sama dengan instansi pemerintah,akademisi, TNI/polri maupun nasional maupun International.

## C. PRIORITAS DAERAH

Kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas daerah serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down, holistik-tematik, integratif, dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.



Berdasarkan Prioritas RPJMD Kabupaten Tanah Laut dan SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut mempunyai beberapa prioritas yaitu:

- 1) pelayanan informasi rawan bencana;
- 2) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- 3) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan



**BAB III**  
**URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**  
**DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

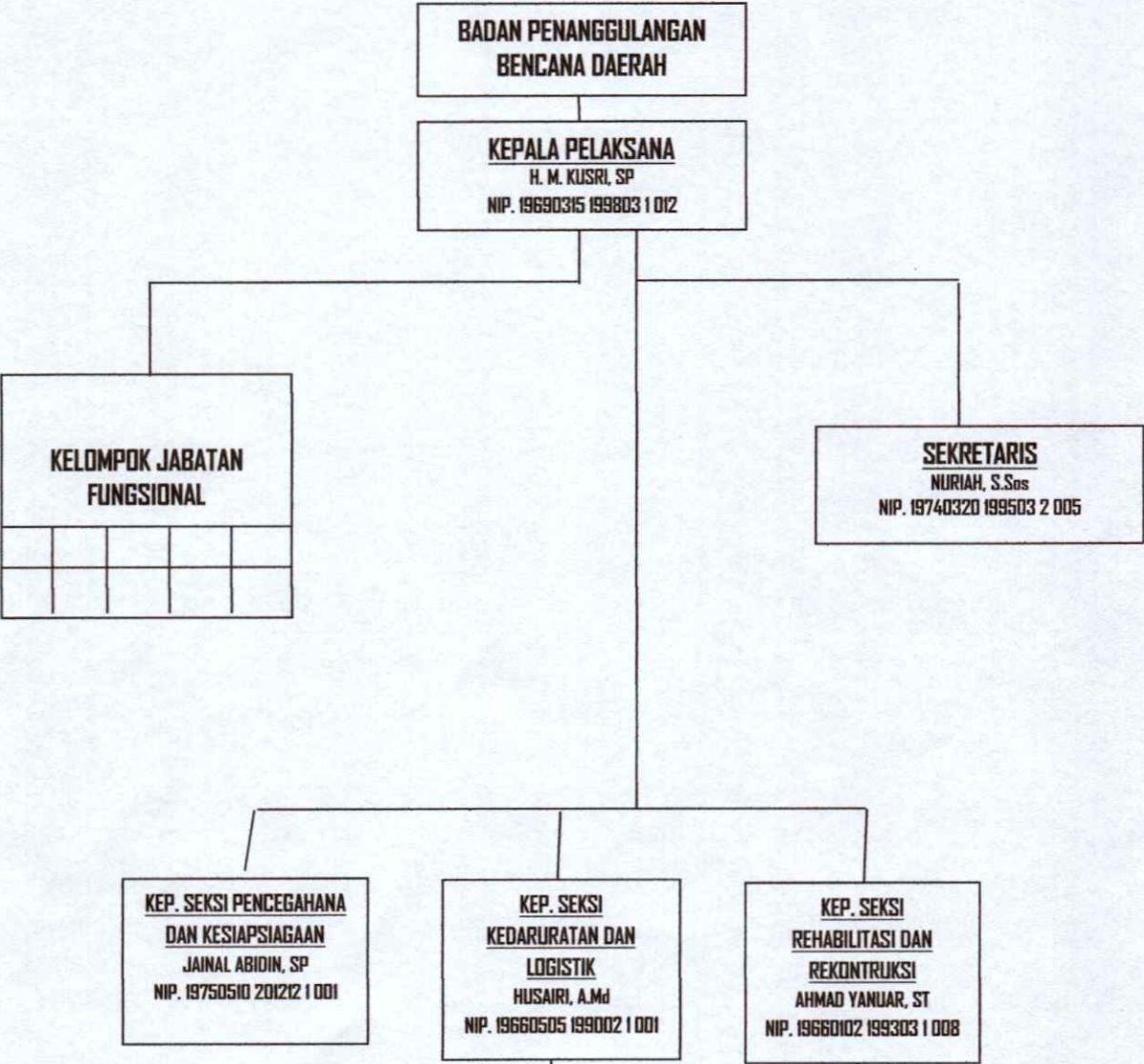
**A. URUSAN KONKUREN**

**a. Ringkasan Urusan Wajib**

**1. Organisasi perangkat Daerah Pelaksana**

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut berdasarkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang perubahan kedua atas peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

**BAGAN 1.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT**





## 2. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2019 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
  - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
  - g. Penyediaan alat tulis kantor
  - h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - i. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - j. Penyediaan makanan dan minuman
  - k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
  - l. Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
  - b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3. Program peningkatan disiplin aparatur
  - a. Pengadaan pakaian kerja lapangan
4. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial
  - a. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa.
5. Program kerjasama informasi dengan mas media
  - a. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat
6. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
  - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam
  - b. Pelatihan Kewaspadaan Dini Bencana
  - c. Peringatan Dini Bencana
  - d. Pelatihan Pengendalian dan Penanggulangan wilayah pasca bencana alam.
7. Program Perlindungan masyarakat
  - a. Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran

## 3. Tingkat Pencapaian Urusan Wajib

Tingkat capaian urusan Wajib Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut yaitu urusan kebencanaan yang terjadi pada tahun 2019 mencapai 100%



sudah tertangani dan menyalurkan logistik untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak bencana.

**Tabel 1.1**  
**Kejadian Bencana di Kabupaten Tanah Laut**

NO	JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN
1.	KEBAKARAN	
	a. Rumah dan Toko	40 Kali
	b. Lahan / Hutan	596 Kali
	c. Dapur Harang	28 Kali
	d. Gudang Penyimpanan Harang	1 kali
	e. Kandang Ayam	2 Kali
	f. Peternakan Ayam	1 Kali
	g. Perkantoran	1 Kali
2.	POHON TUMBANG	6 Kali
3.	PENEMUAN MAYAT	3 Kali
4.	ANGIN PUTING BELIUNG	18 Kali
5.	BANJIR	2 Kali
6.	PASANG AIR LAUT	1 Kali
TOTAL KEJADIAN		699 Kali

Pada tahun 2019 terjadi 699 kali kejadian bencana di Kabupaten Tanah Laut. Kejadian bencana terbanyak yang ditangani oleh BPBD Kabupaten Tanah Laut adalah bencana kebakaran yang terjadi sebanyak 667 kali dengan jumlah kebakaran terbanyak terjadi pada kebakaran hutan dan lahan sebanyak 596 kali. Kebakaran lahan kebanyakan terjadi akibat ulah tangan manusia sendiri untuk membersihkan lahan dengan cara membakar karena anggapan masyarakat dari segi biaya lebih murah dan praktis, namun pada saat monitoring di lapangan dengan pihak terkait TNI/Polri, masyarakat yang membakar tidak berada ditempat atau ditinggalkan dan rendahnya pemahaman masyarakat membuka lahan dengan cara di bakar.

Sedangkan pada tahun 2018 Bencana yang tangani oleh BPBD Kabupaten Tanah Laut sebanyak 249 kali dengan perincian sebagai berikut : Kebakaran Rumah sebanyak 20 Kali, Kebakaran hutan dan lahan sebanyak 187 kali, Kebakaran Dapur Harang 20 Kali, Kios 2 Kali, Mobil 2 Kali, Mess Karyawan 1 Kali, Bangunan Bangsau 2 kali, Banjir 5 kali, Gelombang Pasang 1 kali, Penemuan mayat 2 kali, Angin Puting beliung 5 Kali, dan pohon tumbang 2 kali.

Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kejadian bencana pada Tahun 2019 dan Tahun 2018 di Kabupaten Tanah Laut ini mengalami kenaikan dengan persentase kejadian 280%. ini dikarenakan ini diakibatkan fenomena El Nino. El Nino merupakan fenomena memanasnya suhu muka laut di Samudera Pasifik bagian tengah hingga timur. Dampak dari El Nino yang terjadi di sejumlah daerah Indonesia adalah



kondisi kering dan berkurangnya curah hujan. "Fenomena El Nino bersamaan dengan musim kemarau sehingga dampak yang dirasakan adalah kemaraunya menjadi lebih kering dibanding tahun 2018, Fenomena ini terjadi biasa 5 tahunan sesuai dengan bencana yang terjadi pada Tahun 2015 yang ditangani oleh BPBD cukup tinggi.

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Jumlah pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut terhitung pada bulan Desember 2019 adalah 14 (empat belas) orang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2  
Jumlah Pegawai Pergolongan / Pendidikan Tahun 2019

Golongan / Kepangkatan				Jumlah	Pendidikan							Jumlah
Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I		S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	
1	5	8	-	14	-	5 (Pejabat Struktural)	1	-	8	-	-	14

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Tabel 1.3

No	Urusan / Program / Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	2	3	4	5
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.075.283.309	1.907.809.471	91,93%
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	71.000.000	46.323.849,-	65,24%
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000	28.970.000,-	96,57%
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	367.220.000	313.801.474	85,45%
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	25.352.500	4.467.100	17,62%
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2.249.900	2.239.000	99,52
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	33.150.000	17.130.000	51,67%
7	Penyediaan alat tulis kantor	17.090.900	16.479.900	96,42%
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.199.700	5.376.600	74,68%



9	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.681.798	2.064.000	76,96%
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	16.200.000	16.200.000	100%
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	358.400.000	358.400.000	100%
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	28.300.000	28.285.000	99,95
13	Penyediaan jasa penunjang SKPD	1.116.438.511	1.068.072.548	95,67%
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>24.290.000</b>	<b>23.700.000</b>	<b>97,57</b>
14	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	24.290.000	23.700.000	97,57
<b>3</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>	<b>55.335.000</b>	<b>54.560.000</b>	<b>98,60%</b>
15	Pengadaan pakaian kerja lapangan	55.335.000	54.560.000	98,60%
<b>4</b>	<b>Program Kerjasama informasi dengan mas media</b>	<b>17.413.858</b>	<b>16.277.700</b>	<b>93,48%</b>
16	Penyebarluasan informasi kepada masyarakat	17.413.858	16.277.700	93,48%
<b>5</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>115.349.850</b>	<b>109.656.000</b>	<b>95,06%</b>
17	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	115.349.850	109.656.000	95,06%
<b>6</b>	<b>Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b>	<b>238.997.650</b>	<b>209.838.700</b>	<b>87,80%</b>
18	Pengadaan Sarana dan Prasarana evakuasi penduduk dari ancaman /korban bencana alam	87.799.750	79.747.900	90,83%
19	Pelatihan Kewaspadaan Dini Bencana	52.199.700	50.322.800	96,40%
20	Peringatan Dini Bencana	49.498.900	40.135.000	81,08%
21	Pelatihan pengendalian dan penanggulangan wilayah pasca bencana alam	49.499.300	39.633.000	80,07%
<b>7</b>	<b>Program Perlindungan Masyarakat</b>	<b>76.499.500</b>	<b>74.345.500</b>	<b>97,18%</b>
22	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	76.499.500	74.345.500	97,18%
	<b>J U M L A H</b>	<b>2.603.169.167</b>	<b>2.396.187.371</b>	<b>92,05%</b>

## 6. Kesesuaian Perencanaan Pembangunan Daerah

Sebagai dokumen perencanaan daerah yang memuat visi<sup>[1]</sup> dan misi serta program pembangunan selama 5 (lima) tahun, perencanaannya harus berpedoman kepada RPJPD yang memiliki durasi 20 (dua puluh) tahun dan sekaligus menjadi pedoman bagi perencanaan



pembangunan tahunan dalam dokumen RKPD. Dalam mengoperasionalkan pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran dalam RPJMD, maka seluruh Perangkat Daerah menyusun Renstra OPD yang berdurasi 5 (lima) tahun. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja) sebagai dokumen perencanaan tahunan masing-masing Perangkat Daerah. Sejalan dengan itu, penyusunan LPPD dan LKPJ BPBD Kabupaten Tanah laut berpedoman kepada: (1) RPJPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025, (2) RTRW Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036.

7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang di gunakan

Pada Tahun 2017 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut menempati Ex Kantor Badan Kesbangpol dengan luas bangunan ± 144 m<sup>2</sup> yang beralamat di Jalan Syahrani Pelaihari. Gedung Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki beberapa ruangan yang masih dapat difungsikan berikut ini

Tabel Tabel 1.4  
Kondisi Sarana yang digunakan

No	JENIS RUANGAN	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
1.	Kepala Badan	1	Ruang	Baik
2.	Sekretariat	1	Ruang	Baik
3.	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	Ruang	Baik
4.	Kasi Rehabilitasi dan rekonstruksi	1	Ruang	Baik
5.	Kasi Kedaruratan dan Logistik	1	Ruang	Baik
6.	Ruang Bendahara dan Bendahara Pembantu	1	Ruang	Baik
7.	Gudang Logistik	1	Ruang	Baik
8.	Kamar mandi	2	Ruang	Baik



**Tabel 1.5.**  
**SARANA DAN PRASARANA**

Nama Perangkat Daerah	Dasar Pembentukan	Struktur Organisasi	Sarana Prasarana		Ket
			Jenis Sarpras	Sumber Anggaran (APBN / APBD / Hibah)	
BPBD Kab. Tanah Laut	Perda Kab. Tala No. 10 Th. 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Organisasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut	Kepala Pelaksana	Bangunan Kantor	APBD	Kantor BPBD
		Sekretaris	Gudang Logistik	APBD	Kantor BPBD
		Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Pusdalops	APBD	Ada
		Kasi Kedaruratan dan Logistik	Garasi	APBD	Kantor BPBD
		Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Posko BPBD	APBD	1. Kec. Takisung 2. Kec. Kurau 3. Kec. Bati2 4. Kec. Jorong 5. Kec. Kintap
			Mesin Portable	APBN	1 buah
			Pompa Apung	APBN	2 buah
			Pompa Pemadam Karhutla Utama	APBN	1 buah
			Pompa Pemadam Karhutla Menengah	APBN	1 buah
			Flexible Tank 1500 gl	APBN	1 buah
			Perahu Evakuasi	APBN	2 buah
			Mobil Rescue	APBN	1 buah
			Motor Trail	APBN	2 buah
			Tenda Posko	APBN	1 buah
			Tenda Pengungsi	APBN	2 buah
			Solar Cell	APBN	5 buah
			Tenda Keluarga	APBN	7 buah
			Solar Handle lamp	APBN	8 buah
			Velbed	APBN	35 buah
			Genset 1,2 KW	APBN	2 buah
			Genset 5,5 KA	APBN	1 buah



		Senter Rescue HID Search Light	APBN	5 buah
		Chainsaw	APBN	1 buah
		Handy Talky	APBN	5 buah
		RIG	APBN	5 buah
		SSB	APBN	3 buah
		WTP	APBN	1 buah
		Mesin Portable	APBD	1 buah
		Mini Bus Avanza	APBD	1 buah
		Pick Up	APBD	1 buah
		Pemadam Kebakaran 4000 liter	APBD	6 buah
		Pemadam 500 liter	APBD	1 buah
		Sepeda Motor Trail	APBD	2 buah
		Sepeda Motor	APBD	5 buah
		Perahu Dolphin	APBD	1 buah
		Perahu Karet	APBD	6 buah
		Velbed	APBD	22 buah
		Genset	APBD	2 buah
		Tenda Pleton	APBD	2 buah

## 8. Permasalahan dan Solusi

### 1. Permasalahan

Permasalahan yang terjadi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran 2019, adalah :

- Peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang belum dapat dilaksanakan karena besarnya biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana tersebut.
- Pada saat musim kemarau Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan sulit untuk dipadamkan apabila kebakaran hutan tersebut tidak bisa dijangkau oleh armada masuk
- Penyaluran logistik untuk kebutuhan dasar bagi korban yang terdampak bencana sedikit terlambat di karenakan tidak dianggarkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, tapi harus minta melalui surat ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Kelengkapan dan alat-alat pengaman personil yang belum memadai.

### 2. Solusi

- Peningkatan sarana dan prasarana pendukung tugas operasional lapangan seperti kendaraan damkar, rescue, dan peralatannya (baik untuk kebutuhan lapangan maupun untuk kelengkapan pengamanan personil).



- b) Untuk hutan dan lahan yang tidak bisa dilalui oleh armada maka dilakukan dengan water boombing itu pun harus menghubungi pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- c) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut masih melakukan pendekatan dengan pihak TAPD untuk bisa dianggarkan di APBD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- d) Adanya dukungan lintas sektoral untuk kelancaran operasional lapangan



## **BAB IV**

### **REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)**

#### **TAHUN 2019**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 tidak melaksanakan program nasional berdasarkan rencana kerja pemerintah (RKP).



## **BAB V**

### **TUGAS PEMBANTUAN**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2019 tidak mendapatkan tugas pembantuan dari pusat yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia dan tidak memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah pusat, kabupaten lain dan Desa yang ada di Kabupaten Tanah Laut.



## BAB VI

### TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

#### A) Kerjasama Antar Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud.

#### B) Kerjasama dengan pihak ketiga

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud.

#### C) Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melaksanakan koordinasi dengan:

1. Forum Koordinasi Penanggulangan bencana di Daerah Kabupaten Tanah Laut
2. Materi Koordinasi Menindaklanjuti penetapan status darurat bencana Banjir, Tanah Longsor, Angin putting beliung dan Kebakaran Hutan dan Lahan
3. Instansi Vertikal yang terlibat adalah TNI dan POLRI
4. Sumber dan Jumlah Anggaran yaitu : Kegiatan Pencegahaan dan Perlindungan bahaya Kebakaran jumlah anggaran Rp. 76.499.500,- dan Kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa jumlah anggaran 115.349.850,- kedua kegiatan tersebut bersumber dari APBD Kab. Tanah Laut
5. Satuan kerja perangkat daerah penyelenggara koordinasi dengan instansi vertikal di daerah yaitu BPBD Kabupaten Tanah Laut
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai Pergolongan / Pendidikan Tahun 2019

Golongan / Kepangkatan				Jumlah	Pendidikan							Jumlah
Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I		S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	
1	5	8	-	14	-	5 (Pejabat Struktural)	1	-	8	-	-	14

Jumlah PTT di BPBD dan kualifikasi Pendidikan

No	Uraian Jabatan	Pendidikan				Jumlah
		S1	D3	SLTA	SLTP	
1	Tim Reaksi Cepat (TRC)			20		20 orang
2	Pusdalops	4	1	1		6 Orang
3	Petugas Administrasi	4		3		7 orang
4	Petugas Kebersihan			1		1 Orang



	Jumlah	33 orang
--	--------	----------

7. Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan pada tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) kali
8. Hasil koordinasi yaitu terjalinnya komunikasi dan Manfaatnya yaitu terbentuknya sistem konsolidasi yang solid sesuai dengan rencana kontinjensi Bencana Banjir (siapa berbuat apa)
9. Tindak lanjut hasil koordinasi yaitu melaksanakan penanggulangan bencana dan pembentukan pos komando bencana banjir dan Karhutla di kecamatan yang masuk kategori paling tinggi bencana ke 2 tersebut.
10. Hal-hal yang perlu untuk dilaporkan tidak ada

#### D) Pembinaan Batas Wilayah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak menyelenggarakan urusan / kegiatan dimaksud

#### E) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

- 1) Bencana yang terjadi tahun 2019 dan penanggulangannya

**Tabel 4.1**  
**Bencana yang terjadi Tahun 2019**

NO	JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN
1.	KEBAKARAN	
	a. Rumah dan Toko	40 Kali
	b. Lahan / Hutan	596 Kali
	c. Dapur Harang	28 Kali
	d. Gudang Penyimpanan Harang	1 kali
	e. Kandang Ayam	2 Kali
	f. Peternakan Ayam	1 Kali
	g. Perkantoran	1 Kali
2.	POHON TUMBANG	6 Kali
3.	PENEMUAN MAYAT	3 Kali
4.	ANGIN PUTING BELIUNG	18 Kali
5.	BANJIR	2 Kali
6.	PASANG AIR LAUT	1 Kali
	<b>TOTAL KEJADIAN</b>	<b>699 Kali</b>



- Pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui BPBD Kabupaten Tanah Laut dengan melakukan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat, diwilayah-wilayah rawan bencana dan membentuk relawan disebagian wilayah Kabupaten Tanah Laut.
- Penanggulangan : saat ini BPBD telah membentuk tim penanggulangan bencana di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan kurau, Takisung, Bati-Bati, Jorong dan Kintap, dalam rangka menanggulangi kejadian bencana yang sewaktu-waktu bisa terjadi dan membentuk Desa Tangguh bencana (DESTANA) sebagai upaya preventif Pemerintah Daerah dalam menghadapi bencana terutama karhutla yang mendominasi kejadian bencana di Kabupaten Tanah Laut.

## 2) Status Bencana

Dari semua kejadian bencana di atas tahun 2019 status bencana tersebut merupakan bencana yang terjadi di Kabupaten Tanah Laut yaitu terjadi di wilayah Kabupaten yang mempunyai Indeks Risiko Bencana dengan urutan 132 dari Kabupaten/kota di Indonesia .

## 3) Sumber dan Jumlah Anggaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut di Tahun 2019 dalam melaksanakan kegiatan kebencanaan di biyai yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tanah Laut dan Jumlah Anggaran yang masuk di DPA BPBD berjumlah Rp. 2.603.169.167,- .

## 4) Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana di Kabupaten Tanah Laut adalah :

1. BPBD melakukan koordinasi dengan instansi terkait, berkaitan dengan info-info bencana, yaitu kantor BMKG Banjarbaru, yang selama ini intensif memberikan info-info kondisi cuaca yang ada diwilayah Kabupaten Tanah Laut.
2. Berkoordinasi dengan instansi lainnya berdasarkan dokumen Rencana Kontinjensi yang telah disusun.
3. Penetapan status siaga darurat bencana
4. Penetapan pos komando siaga darurat bencana
5. Telah disusunnya dokumen rencana kontinjensi (renkon) dalam menghadapi bencana banjir di wilayah Kabupaten Tanah Laut, sehingga dokumen tersebut jadi patokan semua yang terlibat dalam menghadapi bencana.
6. Telah terbentuknya relawan-relawan yang turut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
7. Penempatan pegawai BPBD disetiap posko-posko yang ada diwilayah Kecamatan Kurau, Bati-Bati, Jorong, Takisung dan Kintap di persiapkan selalu siaga bencana selama 24 jam berjaga.

## 5) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menagani Bencana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut bahwa Badan penanggulangan Bencana Daerah yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi dalam kebencanaan,

Bencana yang ditangani oleh BPBD sesuai kajian risiko bencana tahun 2018 – 2022 yaitu ada 7 (tujuh) Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrim, Gelombang Ekstrim Dan Abrasi, dan bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan.



6) Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah Pegawai Pergolongan / Pendidikan Tahun 2019

Golongan / Kepangkatan				Jumlah	Pendidikan							Jumlah
Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I		S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	
1	5	8	-	14	-	5 (Pejabat Struktural)	1	-	8	-	-	14

Jumlah PTT di BPBD dan kualifikasi Pendidikan

No	Uraian Jabatan	Pendidikan				Jumlah
		S1	D3	SLTA	SLTP	
1	Tim Reaksi Cepat (TRC)			20		20 orang
2	Pusdalops	4	1	1		6 Orang
3	Petugas Administrasi	4		3		7 orang
4	Petugas Kebersihan			1		1 Orang
	<b>J U M L A H</b>					<b>33 orang</b>

7) Kelembagaan yang khusus dibentuk menangani bencana

Pada Tahun 2018 sampai sekarang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut membentuk DESTANA (Desa Tangguh Bencana) di beberapa Desa yaitu Desa Penjaratann Kecamatan Pelaihari, Desa Sei Bakar Kecamatan Bajuin, Desa Kali Besar Kecamatan Kurau dan Desa Gunung Raja Kecamatan Tambang Ulang.

8) Potensi Bencana yang diperkirakan terjadi pada tahun 2019

Berdasarkan perkiraan Badan Meterologi, klatatologi dan Giofisika Banjarbaru ada beberapa bencana yang kemungkinan akan terjadi pada tahun 2019 adalah :

1. Bencana Banjir Bandang
2. Bencana Banjir
3. Bencana Tanah longsor
4. Kebakaran Hutan dan lahan
5. Puting beliung



## **BAB VII**

### **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

#### **Urusan Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat**

SPM bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi SPM Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah provinsi yaitu pelayanan ketentraman dan ketertiban umum provinsi.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) pelayanan informasi rawan bencana;
- 3) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- 4) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- 5) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Selain itu, perumusan kegiatan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 adalah penanganan konflik sosial, antara lain:

- 1) Penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- 2) Pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- 3) Pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan; dan

Dalam rangka antisipasi pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana yang akhir-akhir ini sering terjadi di seluruh wilayah tanah air yang telah menimbulkan kerugian harta benda dan korban jiwa manusia, maka perumusan kegiatan dalam RKPD Tahun 2018 supaya memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi pemadam kebakaran dan SDM damkar;
- 2) Fasilitasi pusat dan daerah bidang pengurangan resiko bencana, sarana dan prasarana, tanggap darurat dan pasca bencana, standardisasi pemadam kebakaran dan SDM damkar;
- 3) Sarana Prasarana yang dialokasikan bagi pusat dan daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran;
- 4) Implementasi penerapan SPM bidang bencana dan pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 5) Daerah yang melakukan kerjasama dalam penanggulangan bencana dan kebakaran; dan
- 6) Peningkatan partisipasi organisasi kemasyarakatan dan komunitas sukarelawan yang bergerak dalam upaya pengurangan resiko bencana dan kebakaran.



### Target Pencapaian SPM oleh BPBD

No	Program / Kegiatan	Indikator
<b>1</b>	<b>Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b>	
A	Pengadaan Sarana dan Prasarana evakuasi penduduk dari ancaman /korban bencana alam	Jumlah sarana dan prasarana kebencanaan yang terbeli
B	Pelatihan Kewaspadaan Dini Bencana	Jumlah yang mengikuti pelatihan
C	Peringatan Dini Bencana	Jumlah yang mengikuti Peringatan Dini Bencana
D	Pelatihan pengendalian dan penanggulangan wilayah pasca bencana alam	Jumlah Desa tempat pelatihan pasca bencana
<b>2</b>	<b>Program Perlindungan Masyarakat</b>	
A	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Jumlah Laporan
<b>3</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	
A	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah Kejadian Bencana

### Realisasi

No	Program / Kegiatan	Target	Realisasi	Persentase
1	Jumlah sarana dan prasarana kebencanaan yang terbeli	27 buah	27 buah	100%
2	Jumlah yang mengikuti pelatihan	275 orang	275 orang	100%
3	Jumlah yang mengikuti Peringatan Dini Bencana	120 orang	120 orang	100%
4	Jumlah Desa tempat pelatihan pasca bencana	4 Desa	4 Desa	100%
5	Jumlah Laporan	12 laporan	12 laporan	100%
6	Jumlah Kejadian Bencana	249 kali	699 kali	280%

### Alokasi Anggaran

No	Program / Kegiatan	Anggaran (RP)
<b>1</b>	<b>Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam</b>	<b>238.997.650</b>
A	Pengadaan Sarana dan Prasarana evakuasi penduduk dari ancaman /korban bencana alam	87.799.750
B	Pelatihan Kewaspadaan Dini Bencana	52.199.700
C	Peringatan Dini Bencana	49.498.900
D	Pelatihan pengendalian dan penanggulangan wilayah pasca bencana alam	49.499.300
<b>2</b>	<b>Program Perlindungan Masyarakat</b>	<b>76.499.500</b>
A	Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	76.499.500
<b>3</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>115.349.850</b>
A	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	115.349.850



### Dukungan Personil

No	Uraian Jabatan	Jumlah
1	PNS BPBD	14 orang
2	Tim Reaksi Cepat (TRC)	20 orang
3	Pusdalops	6 Orang
4	Petugas Administrasi	7 orang
5	Petugas Kebersihan	1 Orang
	<b>J U M L A H</b>	<b>47 orang</b>

### Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan terjadi bahwa BPBD tidak bisa menargetkan jumlah kejadian bencana di Kabupaten Tanah Laut dikarenakan Cuaca tidak bisa di jadikan patokan karena pada tahun 2018 kejadian bencana terjadi 249 kali, sedangkan tahun 2019 terjadi 699 kali di mana bencana yang terbanyak adalah Kebakaran hutan dan Lahan di mana di karenakan El Nino merupakan fenomena memanasnya suhu muka laut di Samudera Pasifik bagian tengah hingga timur. Dampak dari El Nino yang terjadi di sejumlah daerah Indonesia adalah kondisi kering dan berkurangnya curah hujan.
2. Solusi yang di lakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Tanah Laut adalah dengan melakukan Sosialisasi, Pelatihan, Monitoring ke Daerah –daerah yang potensi bencananya paling tinggi.



## BAB VIII

### AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

#### a. Target Kinerja dalam perjanjian kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan akuntabel serta berorientasi pada hasil dan mencapai target kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan maka pada tahun 2019 ditetapkan target kinerja tahunan yang telah di tandatangani oleh Bupati Tanah Laut, sebagai berikut :

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. TANAH LAUT

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap masyarakat yang terdampak bencana	BAIK
2.	Meningkatkan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana berupa penyediaan peralatan, logistik, dan penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	- Bencana yang di layani sesuai SOP	1 x 24 jam
		- Jumlah korban terdampak bencana yang menerima logistik.	100 Paket
		- Jumlah sarana dan prasarana yang dipenuhi sesuai dengan standar operasional	27 Buah
		- Jumlah peralatan yang dipelihara dan dapat difungsikan	25 Buah
		- Jumlah data/kejadian dan korban yang terdampak bencana	12 laporan
		- Jumlah Masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti Sosialisasi.	275 orang
		- Jumlah Masyarakat/kelompok masyarakat yang mengikuti pelatihan dan simulasi.	275 orang
		- Jumlah Tenaga TRC yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	35 Orang
		- Jumlah Titik Rawan Bencana	187 Kejadian
		- Jumlah Laporan Data Bencana yang diupdate	3 Dokumen
		- Jumlah Desa Tangguh Bencana	3 Desa
		- Jumlah Posko Penanggulangan Bencana di Kecamatan	5 Kec
		- Jumlah Masyarakat/ kelompok masyarakat pasca bencana yang difasilitasi	6 Kali
		- Jumlah Korban dan Lokasi yang terkena dampak pasca bencana	12 Kali
		- Jumlah Korban Pasca bencana yang Rehabilitasi melalui pelatihan,	4 Desa/Kec



			pendekatan sosial, Psikologis, ekonomi dan budaya.	
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi organisasi	-	Persentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai SOP	100%
		-	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dapat terpenuhi sesuai aturan	6 Buah
		-	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dipelihara dan dapat di fungsikan	19 Buah
		-	Jumlah Administrasi kepegawaian yang dikelola sesuai ketentuan	5 Dokumen
		-	Jumlah event yang di ikuti	2 Pameran
		-	Jumlah Dokumen perencanaan dan keuangan sesuai aturan	3 Dokumen
		-	Jumlah Laporan Keuangan yang tersusun dengan baik dan tepat waktu	5 Laporan
		-	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja	1 Laporan

#### b. Pengukuran Capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja

Perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) melalui hasil survey dengan 150 (seratus lima puluh) Kuesioner kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Dalam rangka memperoleh informasi kinerja yang penting dan memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dapat dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan secara membandingkan antara nilai target terhadap realisasi, apabila target terpenuhi maka dikategorikan tercapai, dan begitu juga sebaliknya apabila nilai target tidak tercapai maka dikategorikan tidak terpenuhi.

Berdasarkan keputusan MENPAN Nomor 14 Tahun 2017 memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 81,23 dengan angka indeks sebesar 81,23 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan B dengan kategori **MEMUASKAN**, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 62,51 – 81,25.

#### c. Pengukuran Capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Tahun 2018 merupakan tahun kelima dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut yang telah ditetapkan sasaran beserta capaian kinerja, maka dalam rangka membandingkan capaian kinerja antara tahun 2018 dengan 2019, sebagai berikut :



Realisasi Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Tahun 2019 dan Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2018	Realisasi 2019
1	Meningkatnya pelayanan penanggulangan bencana terhadap masyarakat	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) yang terdampak bencana	BAIK	BAIK

**d. Pengukuran capaian kinerja di bandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana bahwa penanganan penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi nonpemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, sehingga BPBD Kabupaten Tanah Laut harus Membangun sinergitas yang baik dengan pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kabupaten / kota di Propinsi Kalimantan Selatan sehingga capaian kinerja BPBD Kabupaten Tanah Laut dapat diukur sesuai dengan Misi yang ke 5 Kabupaten Tanah Laut yaitu : “ Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.

**e. Analisis Efisiensi penggunaan Sumber daya dikaitkan dengan hasil kinerja yang telah di capai.**

Penggunaan sumber daya di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut belum memadai untuk mencapai target hasil kinerja sehingga tidak tercapai, di karenakan peralatan yang kurang memadai, sumber daya manusia yang tidak memiliki pelatihan di bidang kebencanaan, akan tetapi BPBD Kabupaten Tanah Laut tetap memberikan pelayanan kebencanaan kepada masyarakat yang terdampak bencana sesuai dengan SOP.

**f. Analisi program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja**

Analisi program dan kegiatan pada tahun 2019 untuk mendukung pencapaian target kinerja adalah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perjanjian kinerja melalui tabel berikut :

	Program		Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp)
1.	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	-	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam	80.999.750,00	79.747.900,-
		-	Pelatihan kewaspadaan dini bencana	52.199.700,00	50.322.800,-
		-	Pelatihan pengendalian dan penanggulangan	49.499.300,00	40.135.000,-



		- wilayah pasca bencana alam		
		- Peringatan Dini Bencana	49.498.900,00	39.633.000,-
2.	Program Perlindungan Masyarakat	- Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran	76.499.500,00	74.345.500,-
3.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	- Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	115.349.850,00	109.656.000,-
4.	Program kerjasama informasi dengan mas media	- Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	17.413.858,00	16.277.700,-
		- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	71.000.000,00	46.323.849,-
		- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.000.000,00	28.970.000,00
		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	367.220.000,00	313.801.474,-
		- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	25.352.500,00	4.467.100,-
		- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2.249.900,00	2.239.000,-
		- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	4.300.000,00	17.130.000,-
		- Penyediaan Alat Tulis Kantor	17.090.900,00	16.479.900,-
		- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	7.199.700,00	5.376.600,-
		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.681.798,00	2.064.000,-
		- Penyediaan makanan dan minuman	16.200.000,00	16.200.000,-
		- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	358.400.000,00	358.400.000,-
		- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	28.300.000,00	28.285.000,-
		- Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD	1.116.438.511,00	1.068.072.548,-
6	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	- Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	24.290.000,00	23.700.000,-
	<b>J U M L A H</b>		<b>2.603.169.167,00</b>	<b>2.396.187.371,0</b>



## **BAB IX PENUTUP**

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi, dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut telah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarannya, sedangkan hasil capaian kinerja keuangan berdasarkan indikator input berupa sumber dana adalah 92,05% di mana dari jumlah anggaran sebesar Rp 2.603.169.167,- realisasinya sebesar Rp 2.396.187.371,-. Dengan pencapaian kinerja 92,05% pada sasaran ini berarti kinerja Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Tanah Laut tergolong pada Kategori baik, hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari kinerja aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut yang telah mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Dari hasil analisa tersebut dapat dilihat capaian kinerja program/kegiatan serta permasalahan dan alternatif solusi. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2019 menjadi masukan bagi Badan Penanggulangan bencana Daerah (BPBD) untuk tahun selanjutnya.

Demikian laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Badan Penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut semoga sasaran program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran program tahun 2019 dapat dicapai dengan lebih baik dari tahun ketahun.

Pelaihari, Januari 2020

**Kepala Pelaksana**

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Tanah Laut**



**H. MUH. KUSRI, SP**  
**NIP. 19690315 199803 1 012**